

Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
(Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)
Evaluation Of Management Of Operational Fund Of Case Study In The SD Inpres 4 Akediri Village District Jailolo Regency Halmahera West

Oleh:
Erdiani Silele¹
Harijanto Sabijono²
Rudy J. Pusung³

^{1,2,3}, **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi**
Universitas Sam Ratulangi, Manado

E-mail:
erdianisilele@gmail.com¹
h_sabijono@yahoo.com²

Abstrak : Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan dana BOS sudah sesuai Juknis BOS 2015 karena dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan dari dana BOS yang didapatkan SD Inpres 4 halmahera barat yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk tahun 2016 adalah Rp.134.400.000/tahun,-(2) Pelaksanaan dana BOS tidak sesuai dengan Juknis BOS 2015 khususnya dalam penyusunan seharusnya setelah hasil dari evaluasi rapat bersama maka selanjutnya penyusunan RKAS disahkan oleh SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat, pengalokasian dana BOS sudah sesuai dengan Juknis BOS 2015 , dan untuk penyaluran dana BOS tidak sesuai dengan Juknis BOS 2015, mengalami keterlambatan dalam beberapa proses pencairan (3) Penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan Juknis BOS 2015, hanya memenuhi 11 komponen pembiayaan dari 13 komponen yang dibiayai dana BOS, hal itu disebabkan karena hanya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah saja dan (4) Pelaporan pertanggungjawaban dana BOS tidak sesuai Juknis 2015 untuk laporan intern khususnya dalam transparansi penggunaan dana BOS karena tidak membuat papan spanduk informasi dan untuk laporan ekstern khususnya pada opname kas dan berita acara pemeriksaan kas tidak ada serta pembukuan dana BOS tidak lengkap.

Kata Kunci : *Evaluasi Pengelolaan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*

Abstract: *School Operational Assistance Fund (BOS) is a government program that essentially is to provide nonpersonal operating costs for basic education units as implementers of compulsory education programs. The method of analysis used is descriptive qualitative analysis method. The results showed that (1) the BOS fund planning was in accordance with technical guidance BOS 2015 as seen from Government Regulation Number 48 Year 2008 About education funding. The funding for education from the BOS funds obtained in the 4 Elementary School of the West Halmahera sourced from the APBN for 2016 is Rp.134.400.000 / year, -. (2) the implementation of BOS funds for all components almost have been successful and in accordance with BOS 2015 Technical guidance, but in the preparation of RKAS is not in accordance with technical guidance BOS because of the drafting of RKAS is not authorized by education office of West Halmahera Distric. BOS fund allocation is in accordance with BOS 2015, And for the disbursement of BOS funds there are already in accordance with BOS 2015. But there are also not appropriate because of delay in some liquefaction process. (3) the use of BOS funds is not in accordance with the BOS 2015, guidelines it only meets 11 components of financing from 13 components that are funded BOS funds , it is only tailored to the needs of the school only and (4) the reporting of BOS funding 2015 for internal reports and external reports of some components there are appropriate and also that are not in accordance with the BOS 2015 guidelines, there is no complete bookkeeping Due to the lack of attention between the relevant education office and School which With the management of BOS funds and in the transparency of the use of BOS funds in Inpres 4 elementary school of Halmahera Barat do not provide banners of information on the use of BOS funds.*

Keywords : *Management Evaluation, School Operational Assistance Fund (BOS)*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga perlu mendorong pemerintah dan pemerintah daerah melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dengan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat, maka pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Pada Kabupaten Halmahera Barat adalah salah satu kabupaten yang telah menerima dana BOS, jumlah dana BOS yang diterima pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Dana BOS SD dan SMP Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016

Sekolah	Tahun 2016
SD	Rp. 6.288.200,-
SMP	Rp. 3.417.000,-
Rata-rata	Rp. 9.705.200,-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat

Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai Tim manajemen BOS kabupaten/kota yang bertanggungjawab untuk mengarahkan kepada sekolah-sekolah dalam melakukan pengelolaan dana BOS agar pengelolaannya dapat berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015. Pada tahun 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai tim manajemen bos kabupaten/kota dalam melakukan evaluasi langsung ke beberapa sekolah, permasalahan yang didapatkan setelah turun lapangan yaitu kurang lengkapnya pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS yang dikelola oleh sekolah-sekolah khususnya dalam pembukuan dana BOS. Tujuan dalam melakukan evaluasi yaitu untuk mengontrol penggunaan dan memeriksa kelengkapan laporan serta pembukuan dana BOS apakah telah dibuat sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 atau tidak. SD Inpres 4 Halmahera Barat adalah salah satu sekolah yang telah menerima dana BOS yang merupakan program pemerintah pusat tersebut.

Permasalahan yang terjadi dalam program dana BOS pada umumnya adalah masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), karena masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat (Kaswandi, 2015). Untuk itu dana BOS perlu adanya evaluasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS, agar dalam pengelolaan dana BOS apakah sudah sesuai dengan Juknis dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 dan tidak terjadi kebocoran atau penyalagunaan dana BOS.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang judul tentang “**Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat**”.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

Mengetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Inpres 4 Kabupaten Halmahera Barat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dana BOS apakah sudah sesuai dengan Juknis dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Akuntansi

Secara umum akuntansi (*accounting*) dapat di artikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Reeve. *et, al.* 2013: 9).

Konsep Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan / atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencari keuntungan financial. (Nordiawan & Hertianti, 2011: 3).

Konsep Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik paling utama adalah pemerintahan, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Siregar, 2015: 3).

Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Basis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) / anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Tinjauan Tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

1. Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Perencanaan dana BOS diawali dengan pendanaan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
2. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Pelaksanaan pengelolaan dana pendidikan telah menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan yang berkaulitas agar terpenuhi standar pendidikan nasional
3. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008
 - 1) Biaya satuan pendidikan yang meliputi: Biaya investasi, Biaya operas, Bantuan biaya pendidikan dan Beasiswa
 - 2) Biaya penyelenggaraan dan / pengelolaan pendidikan adalah Biaya penyelenggaraan dan / pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/ satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

- 3) Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Menurut peraturan pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) bab vi tentang pelaporan pasal 9 ayat 1-2 yaitu :
 1. Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat satuan pendidikan, laporan kabupaten/kota, laporan propinsi dan laporan pusat.
 2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - 2) Pembukuan;
 - 3) Realisasi penggunaan dana;
 - 4) Rekapitulasi penggunaan dana BOS dan;
 - 5) Penanganan pengaduan masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Farhan (2014), dengan judul : Pengaruh pelaksanaan BOS terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMP NEGERI 241 JAKARTA. Hasil Penelitian yaitu menunjukkan bahwa pengaruh yang rendah antara pelaksanaan bantuan operasional sekolah terhadap prestasi belajar siswa SMP Negeri 241 Jakarta. Bantuan operasional sekolah (BOS) memberikan kontribusi kecil sekali dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.

Kaswandi 2015, dengan judul : Evaluasi pengelolaan dana BOS di SD Negeri 027 Tarakan. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa penyusunan RKAS tepat waktu diawal tahun anggaran, berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, serta melibatkan komite dan guru. Aspek pelaksanaan belum seluruhnya berhasil dikarenakan penyaluran dana BOS masih terlambat. administrasi pembukuan sudah sesuai dengan Permendiknas No. 51 Tahun 2011. Aspek pengawasan masih belum berhasil karena belum ada pengawasan dari pihak komite sekolah dan dinas terkait secara berkala. Aktifitas evaluasi oleh pihak komite sudah dilakukan meskipun belum maksimal. Pelaporan pengelolaan dana BOS di SDN 027 dapat dikatakan sudah berhasil dikarenakan sudah membuat laporan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS sesuai dengan Permendiknas No. 51 Tahun 2011.

Manurung dan Hidir (2013), dengan judul: Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap perilaku etis dalam pengelolaan Dana BOS di Kota Malang. Hasil penelitian yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwas implementasi program BOS pada tahap pelaksanaan secara umum diwarnai oleh beberapa praktik yang kurang sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan BOS 2009. Selain itu secara administratif pengelolaan BOS di sekolah belum transparan dan sikap yang kurang positif dari pengelolah sekolah.

Pratama (2013), dengan judul : Pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi pemerintah dan akuntabilitas publik terhadap efisiensi penyaluran dana BOS pada sekolah dasar di Kecamatan Tanjung pinang Timur. Hasil penelitian yaitu Menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik tidak terdapat hubungan yang positif terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif yaitu dengan tujuan untuk membahas permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, dan menerangkan suatu data atau keadaan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan tersebut berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan, kemudian dikumpulkan sehingga didapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisa masalah yang ada.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat yang lebih difokuskan pada SD Inpres 4 Kabupaten Halmahera Barat sebagai objek yang menerima dan mengelolah dana BOS. Waktu dalam Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu pada bulan April sampai dengan Mei 2017.

Prosedur penelitian

1. Mengajukan permohonan penelitian dengan memasukkan surat penelitian yang telah disetujui dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
2. Melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan kabupaten Halmahera barat yaitu bersama kepala Dinas atau yang mewakili dan bersama kepala sekolah SD Inpres 4 halmahera barat;
3. Mengumpulkan data yang diperlukan melalui survei, observasi dan wawancara.
4. Melakukan proses olah data dan analisis data;
5. Membuat hasil dan pembahasan penelitian;
6. Membuat kesimpulan dan saran.

Metode Pengumpulan Data**1. Jenis data penelitian**

(Kuncoro, 2013: 145) ada dua data yang digunakan dalam penelitian ilmiah yaitu antara lain data kuantitatif dan data kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif.

Data kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun, serta menyajikan sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas pada objek yang diteliti.

2. Sumber data penelitian

1. Kuncoro (2013: 157) sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Yaitu berupa sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi dari Diknas dan juga arsip atau dokumen-dokumen tentang dana bantuan operasional sekolah serta melalui wawancara bersama kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kepala sekolah SD Inpres 4 Kabupaten Halmahera Barat.
2. Kuncoro (2013: 148) sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yaitu melalui sumber-sumber dari jurnal atau dokumen-dokumen tentang dana BOS yang telah dipublikasikan

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data (Kuncoro, 2013)

1. Studi Lapangan,) Dalam penulisan laporan ini, penulis mengambil data secara langsung pada objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : wawancara, observasi dan documenter
2. Penelitian Kepustakaan, yaitu menggunakan literatur-literatur sesuai dengan subjek penelitian.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif, di mana metode ini membahas suatu permasalahan secara terperinci dengan menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan secara

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

SD Inpres 4 Halmahera Bara bertempat pada Kecamatan Jailolo desa Akediri. SD ini dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 1977 yang di kepalai oleh Bapak Ferry Bubane dan pada saat ini SD Inpres 4 halmahera barat di kepalai oleh Ibu Agustina Ch.Tege S.Pd. SD Inpres 4 halmahera barat pada saat mulai beroperasi bernama SD Inpres 1 Akediri tetapi seiring berjalannya waktu dan sesuai dengan pemerintah yang baru, maka SD Inpres 1 Akediri berganti nama menjadi SD Inpres 4 halmahera barat.

Hasil Penelitian

Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Awal perencanaan dana BOS pada SD Inpres 4 Halmahera Barat dengan menyusun RKAS (rencana kegiatan dan anggaran sekolah), dimana ini RKAS disusun pada awal tahun pelajaran. Penyusunan RKAS Tim Pembangunan sekolah (TPS) SD Inpres Halmahera barat telah mengadakan rapat dengan merancang rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) pada awal tahun anggaran 2016 yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, komite Sekolah, dewan guru, orangtua siswa dan lain-lain, dengan perhitungan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Maka Tim Pembangunan Sekolah (TPS) dalam penyusunan RKAS didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Dalam penyusunan RKAS SD Inpres 4 Halmahera Barat, RKAS yang dibuat tidak disahkan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Pendidikan Halmahera Barat

Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Pengalokasian Dana BOS

Pelaksanaan dana BOS dalam pengalokasian tahun 2016 SD Inpres 4 Halmahera Barat, yaitu dengan mengisi pendataan dalam sistem data pokok pendidikan (Depdikdasmen) lalu mengirimkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala sekolah jumlah siswa pada SD Inpres 4 Halmahera barat sebanyak 168 siswa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 jumlah dana BOS yang didapatkan oleh SD adalah sebesar Rp.800.000-. Jadi jumlah dana BOS yang didapatkan SD Inpres 4 Halmahera Barat adalah 168 X Rp.800.000- sama dengan Rp. 134.400.000-. Untuk setiap triwulan SD Inpres 4 Halmahera Barat mendapat pencairan dana BOS sebesar Rp. 33.600.000-, karena mekanisme perhitungannya pada tahun 2016 adalah jumlah rata-rata dana BOS yang didapatkan dalam satu tahun dibagi empat triwulan menjadi Rp.33.600.000.-

2. Penyaluran dana BOS

Proses penyaluran dana BOS di SD Inpres 4 Halmahera Barat yaitu sebagai berikut :

- I. Dari kas umum negara (RKUN) dikirimkan ke kas umum daerah (RKUD), yaitu ke BUD Propinsi (Bendahara Umum Daerah);
- II. Setelah dari kas umum daerah (RKUD) lalu dikirimkan ke masing-masing rekening sekolah.

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Indikator kinerja program mencakup penggunaan dana BOS sesuai petunjuk teknis dana BOS nomor 80 2015. Telahan terhadap dokumen penggunaan dana yang diperoleh bahwa penggunaan dana BOS oleh SD Inpres Halmahera Barat digunakan untuk pembayaran :

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian Bahan Habis Pakai
6. Langganan Daya dan Jasa
7. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah
8. Pembayaran Honorarium Bulanan
9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
10. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah
11. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS SD Inpres 4 Halmahera Barat untuk laporan Intern bentuk laporan pertanggungjawaban dana BOS yang dibuat sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 karena dari pembuatan RKAS (rencana kegiatan dan anggaran sekolah), RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah), pembukuan dana BOS, realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, serta bukti transaksi telah dibuat setiap triwulan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS melalui rapat bersama antara kepala sekolah, bendahara sekolah, semua dewan guru, ketua komite sekolah dan orangtua siswa pada setiap triwulan. Tetapi untuk memenuhi transparansi dalam penggunaan dana BOS sekolah ini tidak membuat spanduk atau papan informasi atas penggunaan dana BOS yang seharusnya sekolah harus membuat spanduk yang ditempelkan pada dinding sekolah agar semua pihak dengan pertimbangan bahwa pihak tersebut berhak untuk mengetahui penggunaan dana BOS (orangtua siswa).

Untuk laporan dan pertanggungjawaban ekstern dana BOS SD Inpres 4 Halmahera Barat juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 karena pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS mulai dari (rencana kegiatan dan anggaran sekolah), RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah) buku kas umum BOS, realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, serta bukti transaksi dibuat setiap triwulan dan dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat (tim manajemen BOS kabupaten/kota). SD Inpres 4 Halmahera Barat bersih dari laporan catatan pengaduan dana BOS karena untuk setiap pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat selalu beritahukan atau dikirimkan kepada pihak yang berhak mengetahui dan menerima pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut.

Pembahasan

Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penyusunan RKAS SD Inpres 4 Halmahera Barat sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 yaitu RKAS disusun pada awal tahun pelajaran 2016 yang disesuaikan dengan skala prioritas sekolah dan harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah yang harus disetujui dalam rapat dewan pendidik dan orangtua siswa. Hanya saja dalam penyusunan RKAS tidak disahkan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) padahal setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah lalu disahkan oleh SKPD Dinas pendidikan Kabupaten Halmahera barat. hal ini dibuktikan pada surat pengantar yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala sekolah SD 4 Inpres Halmahera Barat. Seharusnya setelah disetujui oleh dewan guru dan dengan memperhatikan pertimbangan komite sekolah selanjutnya disahkan oleh SKPD Dinas pendidikan.

Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Pengalokasian Dana BOS

Pelaksanaan dalam pengalokasian dana BOS tahun 2016 pada SD Inpres 4 Halmahera Barat sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 karena dalam pengalokasian dana BOS sekolah ini melakukan pengisian pendataan dalam sistem data pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodikdasmen) berdasarkan jumlah siswa secara *offline* dan mengirimkannya secara *online*. Alokasi jumlah dana BOS pada SD Inpres 4 Halmahera Barat untuk SD dana BOS yang didapatkan adalah jumlah siswa X Rp. 800.000,-.

2. Penyaluran Dana BOS

Penyaluran dana BOS untuk SD Inpres 4 Halmahera Barat sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 yaitu melalui dua (2) tahapan :

Tahap I : Dari RKUN ke RKUD secara triwulan (tiga bulanan)

Tahap II: Dari penyaluran dana BOS dari KUD (kas umum daerah) propinsi ke masing-masing rekening sekolah (rekening SD Inpres 4 halmahera barat).

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penggunaan dana BOS pada SD Inpres 4 Halmahera Barat tidak sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 karena hanya memenuhi 11 komponen dari 13 komponen yang bisa dibiayai dana BOS hal ini terjadi karena penggunaan dana BOS SD Inpres 4 halmahera barat hanya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah saja. 13 komponen menurut petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 penggunaan dana BOS yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian Bahan Habis Pakai
6. Langganan Daya dan Jasa
7. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah
8. Pembayaran Honorarium Bulanan
9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
10. Membantu Peserta Didik Miskin
11. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah
12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer
13. Biaya Lainnya.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS SD Inpres 4 Halmahera Barat untuk laporan Intern bentuk laporan pertanggungjawaban dana BOS yang dibuat sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015. Laporan pertanggungjawaban dana BOS telah dibuat setiap triwulan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS melalui rapat bersama antara kepala sekolah, bendahara sekolah, semua dewan guru, ketua komite sekolah dan orangtua siswa pada setiap triwulan. Tetapi untuk memenuhi transparansi dalam penggunaan dana BOS sekolah ini tidak membuat spanduk atau papan informasi atas penggunaan dana BOS yang seharusnya sekolah harus membuat spanduk yang ditempelkan pada dinding sekolah agar semua pihak dengan pertimbangan bahwa pihak tersebut berhak untuk mengetahui penggunaan dana BOS (orangtua siswa).

Untuk laporan dan pertanggungjawaban ektern dana BOS SD Inpres 4 Halmahera Barat juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 karena pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS dibuat dan dikirimkan setiap triwulan dan dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat (tim manajemen BOS kabupeten/kota). SD Inpres 4 Halmahera Barat bersih dari laporan catatan pengaduan dana BOS karena untuk setiap pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat selalu beritahukan atau dikirimkan kepada pihak yang berhak mengetahui dan menerima pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut. Untuk pembukuan dana BOS SD Inpres 4 Halmahera Barat hanya membuat 3 pembukuan dari 4 pembukuan dana BOS yaitu buku kas umum BOS, buku Pembantu Bank, dan buku pembantu pajak (hanya 1 triwulan). Sedangkan menurut petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 pembukuan dana BOS terdiri dari buku kas umum BOS, buku pembantu kas, buku Pembantu Bank, dan buku pembantu pajak. Serta opname dan berita acara pemeriksaan kas juga tidak dibuat, hal ini bisa terjadi karena ada pergantian kepala sekolah yang baru.

PENUTUP**Kesimpulan**

1. Perencanaan dana BOS pada SD Inpres 4 Halmahera Barat tidak sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 khususnya dalam penyusunan RKAS yang seharusnya disahkan oleh SKPD (Satuan kerja perangkat daerah) Dinas pendidikan Kabupaten Halmahera Barat (Tim manajemen BOS kabupaten/kota). Seharusnya setelah disetujui oleh dewan guru dan memperhatikan pertimbangan komite sekolah maka selanjutnya disahkan oleh SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat.
2. Dalam pelaksanaan dana BOS yang difokuskan pada:
 - 1) Pengalokasian dana BOS
Pengalokasian dana BOS pada SD Inpres 4 Halmahera Barat sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015, karena sekolah ini telah melakukan pengisian atau melakukan *update* data pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodikdasmen). Jumlah siswa pada SD Inpres 4 Halmahera Barat berjumlah 168 siswa sesuai Juknis BOS 2015 untuk SD mendapatkan alokasi dana BOS Rp.800.000.-, jadi 168 X Rp.800.000.- sama dengan Rp.134.400.000. Untuk setiap triwulan sekolah ini mendapatkan pencairan Rp.33.600.000.- karena mekanisme untuk tahun 2016 jumlah rata-rata dana BOS yang didapatkan dalam satu tahun dibagi empat triwulan.
 - 2) Penyaluran dana BOS pada SD Inpres 4 Halmahera Barat sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 yaitu sebagai berikut :
Tahap I : Dari KUN (Kas umum negara) ke KUD (Kas umum daerah) Propinsi Maluku Utara
Tahap II: Dari ke KUD (Kas umum daerah) Propinsi Maluku Utara ke rekening SD Inpres 4 halmahera barat.
3. Penggunaan dana BOS pada SD Inpres 4 Halmahera Barat tidak sesuai dengan dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 karena hanya memenuhi 11 komponen saja dari 13 komponen yang bisa di biyai oleh dana BOS. Hal ini disebabkan karena dalam penggunaan dana BOS sekolah ini hanya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah saja
4. Untuk pelaporan pertanggungjawaban dana BOS SD Inpres 4 Halmahera Barat tidak sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015:
 - 1) Laporan intern khususnya dalam transparansi penggunaan dana BOS pada peneliti menemukan bahwa sekolah ini tidak menyediakan papan informasi atau spanduk atas penggunaan dana BOS.
 - 2) Laporan esktern tidak sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 khususnya dalam pembukuan dana BOS peneliti menemukan bahwa tidak ada pembukuan yang lengkap juga opname kas dan berita acara pemeriksaan kas juga tidak ada.

Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat khususnya pada Dinas pendidikan Halmahera barat agar lebih memperhatikan dalam memberikan bimbingan khusus pada setiap triwulan atau paling tidak setiap semester kepada sekolah-sekolah selaku pihak yang menerima dan mengelola dana BOS teristiwanya pada pelaporan dan pembukuan dana BOS agar setiap sekolah pada kabupaten Halmahera barat bisa mengisi atau membuat pembukuan secara lengkap.
2. Kepada SD Inpres 4 Halmahera Barat dalam pengelolaan dana BOS harus lebih ditingkatkan transparansi dalam penggunaan dana BOS. Yaitu dengan menyediakan papan informasi atau spanduk informasi mengenai penggunaan dana BOS agar semua pihak dengan pertimbangan bahwa pihak tersebut berhak mengetahui penggunaan dana BOS yang sudah dikelola.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa melanjutkan penelitian tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilihat dari prinsip akuntabilitas dan transparansi mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, penggunaan dan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS pemerintah daerah karena mulai tahun 2017 pada kabupaten Halmahera barat, dana BOS sudah dianggarkan pada APBD (Anggaran pendapatan dan belanja daerah).

DAFTAR PUSTAKA

- Farhan, 2014. *Pengaruh Pelaksanaan BOS Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di SMPN 241*. Jakarta. *Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKzrPV_KLSAhVLpo8KHdV2BGAQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.uinjkt.ac.id%2Fdspace%2Fbitstream%2F123456789%2F24741%2F1%2FAHMAD%2520%2520FARHAN%2520\(WATERMAK\).pdf&usg=AFQjCNERI4uHTk9IsqGF72eCC7mHXRKZ8Q&sig2=BR4v6w4KgvCD-TmKriE_w&bvm=bv.147448319,d.c2I](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKzrPV_KLSAhVLpo8KHdV2BGAQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.uinjkt.ac.id%2Fdspace%2Fbitstream%2F123456789%2F24741%2F1%2FAHMAD%2520%2520FARHAN%2520(WATERMAK).pdf&usg=AFQjCNERI4uHTk9IsqGF72eCC7mHXRKZ8Q&sig2=BR4v6w4KgvCD-TmKriE_w&bvm=bv.147448319,d.c2I)
- Kaswandi, 2015. *Evaluasi Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 027 Tarakan*. Jurnal Kebijakan dan Pendidikan. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* Volume 3 Nomor 1 halaman 66-74
ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615.
- <https://www.google.co.id/#q=jurnal+dana+bos+dari+kaswandi>.
- Kuncoro, 2013. *Metode riset untuk bisnis & Ekonomi. Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis?*. Edisi 4. Penebit Erlanga, Jakarta.
- Manurung, Hidir, 2013. *Pelaksanaan Program Dana BOS Pada sekolah dasar Yayasan Bina Mitra Wahana Pekanbaru*. Universitas Riau. *Jurnal Kebijakan Umum*, Volume 4 Nomor 2 halaman 119-218.
- [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=180178&val=2289&title=PELAKSANAAN%20PROGRAM%20DANA%20BANTUAN%20OPERASIONAL%20SEKOLAH%20\(BOS\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=180178&val=2289&title=PELAKSANAAN%20PROGRAM%20DANA%20BANTUAN%20OPERASIONAL%20SEKOLAH%20(BOS)).
- Nordiawan, Hertianti, 2011. *Akuntansi Sektor Publik* (2ed). Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 *Tentang Pendanaan Pendidikan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015. *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*.
- Pratama, 2013. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintah dan Akuntabilitas Publik Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana BOS Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Tanjungpinang Timur*. *Skripsi Fakultas Ekonomi Tanjungpinang Timur*.
- <http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/Fadhli-Wira-P-080420103093.pdf>.
- Reeve, James, Warren, Duchac, Wahyuni, Seoprinyanto, Jusuf, Djakman, 2013. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jilid 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- _____. Salemba Empat, 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Siregar, baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. UPP-STIM YKPN. Yogyakarta